

Analisis Kebijakan Alba & PetroCaribe Nicolas Maduro Moros untuk Menghadapi Dominasi Politik Neoliberalisme Amerika Serikat di Venezuela pada 2015 - 2017

Novelia Revita Wahyuni Loppies¹, Laode Muhammad Fathun², Djoesep Harmat Tarigan¹

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Satya Negara Indonesia, Jakarta, Indonesia

²Program Studi Hubungan Internasional, UPN Veteran Jakarta, Depok, Indonesia

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Satya Negara Indonesia, Jakarta, Indonesia

Revitanovelia@gmail.com

ABSTRACT

During the reign of Chavez and Maduro, the people felt a little prosperity again, but because of America, the situation was getting out of control and was difficult to implement policies on the basis of neoliberalism. After the occurrences of continuous events, Maduro didn't remain silent and continued Chavez's socialist policies. The researcher uses the theory of foreign policy decision making by Alex Mintz and the concept of national interest to explain the factors that influence the interests of Maduro in the policy. This research is a qualitative explanatory research which uses interviews as secondary data and library research as primary data. This research concludes that there are 4 main factors in Nicolas Maduro's foreign policy, namely social factor that have reached a critical point that causes conflict among strata of society which made Maduro ignore people's complaints about him. Second, the psychological factor is that Maduro despises America and is very uncompromising. He was too confident in his belief to fight America, but in the end his belief was not in accordance with his expectations and caused negative effects. Therefore, it is clear that emotions play an important role in important political decisions. Third, the economic factors show that Venezuela is incapable of supporting its own country in terms of economy. If this country supports itself, there will be greater destruction. Lastly, the international factor explains about the IMF intervention and its negative effects on the people's welfare.

Keywords: ALBA, Foreign Policy, National Interest, Neoliberalism, PetroCaribe.

ABSTRAK

Pada masa pemerintahan Chavez serta Maduro, masyarakat merasakan kembali sedikit kesejahteraan, namun karena Amerika keadaan menjadi tidak terkendali dan sulit untuk melaksanakan kebijakan dengan landasan-landasan neoliberalisme. Setelah berbagai peristiwa yang terus terjadi, Maduro tidak tinggal diam dan melanjutkan kebijakan-kebijakan sosialis Chavez. Peneliti menggunakan teori pengambilan keputusan kebijakan luar negeri oleh Alex Mintz dan konsep kepentingan nasional untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepentingan Maduro dalam kebijakan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif eksplanatori yang menggunakan wawancara sebagai data sekunder dan kepustakaan sebagai data primer. Penelitian menyimpulkan bahwa terdapat 4 faktor utama dalam kebijakan luar negeri Nicolas Maduro, yaitu faktor sosial yang sudah mencapai titik kritis sampai terjadi perpecahan di antara lapisan masyarakat yang membuat Maduro akhirnya tidak mendengarkan keluhan kesah rakyat kepada dirinya. Kedua, faktor psikologis Maduro yang memang benci kepada Amerika Serikat dan mempunyai pemikiran yang sangat keras. Maduro terlalu percaya kepada keyakinannya untuk bisa melawan Amerika, yang pada akhirnya keyakinannya ini tidak sesuai dengan harapan dan menimbulkan efek negatif. Oleh karena itu, jelaslah bahwa emosi memainkan peran penting dalam keputusan-keputusan politik yang penting. Ketiga, faktor ekonomi pun juga menunjukkan bahwa Venezuela sudah tidak bisa menopang negaranya sendiri dalam hal ekonomi. Jika hal tersebut terjadi, maka akan terjadi kehancuran yang lebih

besar. Terakhir, faktor internasional yang membahas mengenai intervensi IMF dan dampak buruknya bagi kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: ALBA, Kebijakan Luar Negeri, Kepentingan Nasional, Neoliberalisme, *PetroCaribe*.

PENDAHULUAN

ALBA (Agreement for the Application of the Bolivarian Alternative of the Americas and the People's Trade Agreements) sebagai kerjasama alternatif, dimana pada tahun 2004, Venezuela dan Kuba memprakarsai kerjasama regional bersama dengan ALBA yang dideklarasikan di Ibukota Kuba, Havana, pada tanggal 28 April 2005. Dimana asumsi dasarnya adalah kecenderungan negara-negara yang memanfaatkan rezim atau institusi internasional untuk mencapai kepentingan negara tersebut. Maka, negara-negara tersebut kemudian membentuk rezim selama hal tersebut masih bisa memenuhi kepentingan mereka. Chavez dan Evo Morales yang berkepentingan untuk tetap vokal terhadap Amerika Serikat tentu saja akan melihat kepentingan ini akan lebih baik jika didukung oleh negara-negara lain (Ma'arif, 2012).

ALBA menolak neoliberalisme dengan tujuan untuk membentuk alternatif yang berbeda dari perdagangan bebas. Negara-negara anggota bekerja sama untuk mengintegrasikan ekonomi mereka, sehingga mereka akan mampu untuk melengkapi, bukannya bersaing, dengan satu sama lain. Secara umum tujuan ALBA adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat.

PetroCaribe merupakan bentuk diplomasi minyak yang dibuat oleh Presiden Hugo Chavez, pemimpin Venezuela yang menjabat dari tahun 1999 hingga 2013. Venezuela memperoleh manfaat dari ledakan harga minyak selama tahun 2000-an. Saat Presiden Hugo Chavez mulai berkuasa pada tahun 1999, harga minyak mencapai \$10 per barel. Harga minyak terus mengalami kenaikan selama tahun-tahun berikutnya, hingga mencapai \$133 per barel pada Juli 2008 (Restuccia, 2018). *PetroCaribe* terbentuk pada tahun 2005, tepatnya tanggal 6 September, dan masih berlangsung hingga sekarang dibawah rezim Nicolas Maduro. *PetroCaribe* memiliki tujuan untuk menyediakan minyak ke negara-negara di Karibia, namun ditambah dengan harga yang murah terhadap para anggota dan dengan sistem pembayaran yang meringankan negara-negara pembeli (Elinda, 2017). *PetroCaribe* meringankan negara-negara pembeli dengan sistem *preferential payment*, yang memungkinkan pembayaran yang diangsur. Selain itu juga terdapat sistem barter, yakni pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan barang lain seperti hasil perkebunan, pertanian maupun jasa dari tenaga kerja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teori pengambilan keputusan kebijakan luar negeri yang dikemukakan oleh Alex Mintz dan Karl DeRouen. Teori ini membantu peneliti untuk dapat menganalisis proses pembuatan sehingga dapat memahami pola dari hasil kebijakan. Hasil keputusan yang dibuat akan berdampak besar bagi negara dengan tahapan-tahapan yang berbeda, seperti kebijakan luar negeri yang memiliki nilai tinggi dengan mempertaruhkan suatu hal, ketidakpastian yang besar dan kebijakan luar negeri yang memiliki resiko besar.

Penelitian ini menggunakan unit analisis negara yang berfokus pada faktor-faktor internal negara seperti faktor-faktor yang memaksa negara untuk terlibat dalam perilaku kebijakan luar negeri tertentu. Jadi, peneliti disini melihat bahwa kondisi ekonomi Venezuela yang miskin serta sejarah negara ini yang menyebabkan, negara ini harus ikut serta dalam kebijakan luar negeri yang Maduro lanjutkan dari kebijakan Chavez, yaitu kebijakan ALBA dan PetroCaribe untuk mendukung ekonomi mereka agar tetap berjalan dan juga melakukan kepentingan untuk melawan politik neoliberalisme Amerika Serikat itu sendiri.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan dua metode yaitu secara data kepustakaan dan didukung oleh wawancara. Untuk data kepustakaan, penulis menggunakan buku teks, jurnal, dan *website*. Untuk wawancara penulis memiliki 1 narasumber yaitu Bapak Endriady Edy Abidin, S.IP, MA. Beliau merupakan Dosen Hubungan Internasional dalam bidang kajian Amerika Latin di Universitas Sulawesi Barat.

KERANGKA PEMIKIRAN

TEORI PENGAMBILAN KEPUTUSAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI

Pengambilan keputusan kebijakan luar negeri mengacu pada pilihan individu, kelompok, dan koalisi yang membuat hal itu memengaruhi tindakan suatu negara terhadap lingkungan internasionalnya. Tahap keputusan kebijakan luar negeri biasanya ditandai dengan taruhan tinggi, ketidakpastian yang besar, dan risiko besar (Mintz & DeRouen Jr., 2010). Pengambilan keputusan kebijakan luar negeri adalah cara penting penelitian karena cara pengambilan keputusan dapat membentuk pilihan akhir. Artinya, seorang aktor dapat mencapai hasil yang berbeda tergantung pada keputusan serta proses. Selain itu, keterbatasan kognitif yang signifikan sering mengubah pengolahan informasi. Beberapa keputusan dihitung dengan cermat, sedangkan yang lain lebih intuitif (Mintz & DeRouen Jr., 2010).

Arah politik dunia dibentuk oleh keputusan para pemimpin. Ketidakpastian ikut terlibat dalam pembuatan kebijakan luar negeri dan saling berkaitan, misalnya motif, kepercayaan, niat atau perhitungan. Jika kita bisa mengerti bagaimana keputusan dibuat, kita dapat lebih memahami dan mungkin lebih penting, memprediksi hasil di ranah internasional (Mintz & DeRouen Jr., 2010).

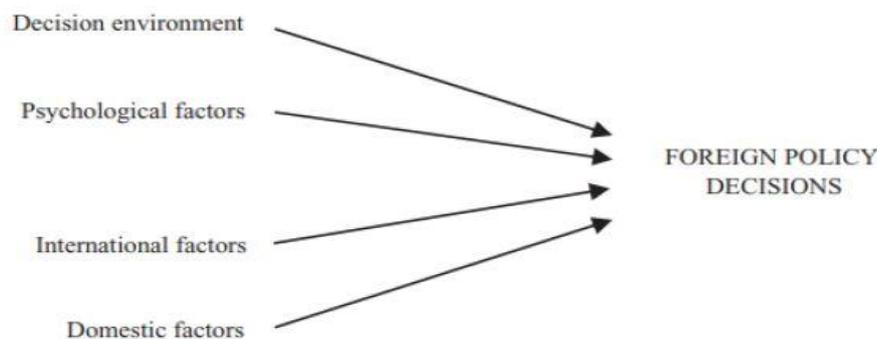


Figure 1.1. Determinants of Foreign Policy Decisions.

Gambar 1. Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Luar Negeri (Mintz & DeRouen Jr., 2010)

Dalam membuat kebijakan, menurut Alex Mintz ada 4 faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan tersebut, yaitu:

1. Pengaruh Budaya atau Kondisi Sosial Suatu Negara

Penelitian telah menunjukkan bahwa ada perbedaan lintas budaya yang signifikan dalam pengambilan keputusan lintas-lintas masyarakat. Maris Martin (2001) menemukan, misalnya Amerika Serikat, Cina, dan Jepang memiliki gaya bisnis yang berbeda dengan gaya pengambilan keputusan nasional yang berbeda. Sehubungan dengan pengambilan keputusan kebijakan luar negeri, meneliti efek dari seorang pemimpin berada dalam domain untung versus rugi pada proses dan pilihan kebijakan luar negeri. Ia menemukan bahwa ketika dihadapkan dengan krisis kebijakan luar negeri, siswa yang berasal dari Cina memeriksa informasi yang jauh lebih banyak daripada rekan-rekan mereka yang berasal dari AS. Penelitian yang menggunakan platform komputerisasi dalam pengaturan eksperimental, menyimpulkan bahwa orang Cina lebih holistik dalam pencarian informasi mereka daripada orang Amerika Utara.

2. Pengaruh Psikologi Seorang Pemimpin Negara

Keputusan pada tingkat tertinggi pemerintahan biasanya dibuat oleh kelompok kecil atau individu yang kuat. Faktor psikologis berpotensi berdampak besar pada keputusan yang dibuat oleh unit kecil ini. Dampaknya bahkan lebih besar jika pengambilan keputusan terjadi selama krisis, pemerintah adalah kediktatoran, atau negara baru merdeka atau mengalami perubahan rezim.

3. Faktor Internasional

Kebijakan luar negeri biasanya dibuat untuk melawan musuh dan sebagai kepentingan nasional negara itu sendiri. Dalam faktor internasional terdapat beberapa hal didalamnya, yakni meliputi perlombaan senjata yang paling kuat, pencegahan, strategi, pembentukan aliansi dan yang terakhir jenis rezim lawan atau musuh.

4. Faktor Domestik

Politik dalam negeri, kondisi ekonomi dan opini publik adalah faktor domestik terpenting yang membentuk pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Analisis keputusan kebijakan luar negeri dapat mengungkap proses kognitif yang mengarah pada pembuatan kebijakan luar negeri dan "masuk ke pikiran" para pemimpin yang membuat keputusan. Ini juga dapat membantu mengidentifikasi pola umum dan cara unik dalam mengambil keputusan dan menghasilkan wawasan tentang gaya kepemimpinan dan kepribadian itu tidak dapat diungkapkan melalui pendekatan sistematis untuk analisis kebijakan luar negeri (Mintz & DeRouen Jr., 2010).

Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas 4 faktor tersebut di dalam kebijakan luar negeri Nicolas Maduro Moros dan menganalisis penyebab terjadinya kebijakan tersebut. Penelitian ini juga menggunakan model poliheuristik dari buku Alex Mintz. Model poliheuristik sendiri adalah menggabungkan elemen rasional dan kognitif dari pengambilan keputusan. Dalam model poliheuristik, pengambilan keputusan kebijakan luar negeri tidak mungkin mengambil jalan alternatif yang mengancam keberlangsungan politik pemimpin tersebut maka dari itu hal ini dihilangkan dari pertimbangan langsung. Prinsip kompensatori dari model poliheuristik menunjukkan

bahwa dalam situasi pilihan, politisi tidak akan menembak diri mereka sendiri dengan memilih alternatif yang cenderung berdampak negatif pada mereka secara politis. Para pemimpin lebih menekankan pada pemrosesan informasi daripada perhitungan yang rasional dan mengintegrasikan argumen "politik dalam negeri sebagai esensi dari keputusan" dengan rasional. Dengan menggunakan metode poliheuristik ini, peneliti melihat bahwa kebijakan Nicolas Maduro ini lebih mengutamakan citra politiknya tetap aman, yaitu mempertahankan kebijakan sosialis dari pendahulunya, Hugo Chavez, daripada melihat dampak kebijakan tersebut bagi rakyat Venezuela sehingga kebijakan Maduro yang mengambil jalan pintas tanpa berpikir secara rasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KEBIJAKAN ALBA

ALBA tidak hanya mempromosikan demokrasi partisipatif dalam struktur sendiri, sebagai bukti komitmen negara-negara anggota untuk melaksanakan demokrasi partisipatoris dalam perbatasan mereka. Tujuan mempromosikan demokrasi partisipatif di ALBA membedakannya dari sistem neoliberalisme, yakni perjanjian perdagangan bebas yang sedang diterapkan pada negara-negara miskin oleh AS dan juga sekutunya. Adapun prospek kerjasama regional ALBA juga bekerja pada tiga ruang yang dimana pada ruang ide, negara-negara anggota percaya perlunya prinsip-prinsip saling melengkapi, solidaritas dan kerjasama untuk mencapai kemakmuran dan pemerataan pembangunan regional.

Pada ruang institusi, ide ini kemudian diintegrasikan dalam ALBA. Melalui pembagian struktur organisasi ALBA, Dewan Politik (Political Council) dan Dewan Ekonomi (Economic Council) memastikan upaya menandingi hegemoni neoliberalisme kemudian dapat terfasilitasi dengan adanya koordinasi kebijakan ekonomi politik diantara negara-negara anggota. Melalui Dewan Sosial (Social Council) dan Dewan Gerakan Sosial (Social Movements Council) dalam struktur organisasi menjadikan ALBA sebagai sebuah organisasi kerjasama regional yang didalamnya rakyat diikutsertakan dalam upaya mencapai kemakmuran dan pemerataan pembangunan (Azizah, 2014).

Kemudian, negara-negara Amerika Latin juga menyerukan pada dunia internasional untuk memberikan bantuan kepada jutaan pengungsi Venezuela yang melarikan diri dari negaranya karena krisis ekonomi, dimana sebanyak 11 negara yang terdiri dari Argentina, Brasil, Ekuador, Kosta Rika, Kolombia, Chile, Meksiko, Panama, Paraguay, Peru dan Uruguay juga menandatangani deklarasi di ibukota Ekuador, Quito, yang menyerukan perlunya peningkatan perhatian untuk mengatasi eksodus warga Venezuela. Delegasi negara-negara tersebut kemudian bertemu di Quito untuk membentuk tim teknis guna mengatasi krisis pengungsi Venezuela. Dimana mereka juga menyerukan peningkatan bantuan bagi warga Venezuela oleh negara-negara Amerika Latin dan dunia internasional. Selain itu, negara-negara di Amerika Latin juga meminta bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Azizah, 2014).

KEBIJAKAN PETROCARIBE

PetroCaribe meringankan negara-negara pembeli dengan sistem *preferential payment*, yang memungkinkan pembayaran dengan cara diangsur. Selain itu juga terdapat sistem barter, yakni pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan barang lain seperti hasil perkebunan, pertanian maupun jasa dari tenaga kerja. Namun beberapa tahun belakangan, keberadaan program PetroCaribe mulai dipertanyakan oleh pihak-pihak dalam negara-negara Karibia tersebut dengan melihat krisis ekonomi yang terjadi di Venezuela saat ini. Hal ini dikarenakan PetroCaribe sangat berkaitan langsung dengan krisis ekonomi yang melanda Venezuela, dimana minyak merupakan komoditas unggulan dan utama dalam perekonomian nasional. Sistem pembayaran yang telah disepakati oleh negara-negara Karibia tersebut tentu sangat dipengaruhi dan terdampak oleh krisis yang terjadi. Meski demikian, hingga saat ini, program tersebut terus berjalan sehingga menarik perhatian dari oposisi di Venezuela maupun dari masyarakat internasional.

Keberadaan PetroCaribe juga diangkat menjadi isu dalam protes-protes yang terjadi karena masyarakat mulai memikirkan dan mempertanyakan keuntungan yang dapat diperoleh Venezuela dari PetroCaribe. Masyarakat Venezuela beranggapan bahwa sistem pembayaran khusus dalam PetroCaribe tersebut justru merugikan Venezuela, khususnya secara ekonomi, sehingga masyarakat meminta pemerintah untuk menghentikan pengiriman minyak ke wilayah Karibia. Berbagai tekanan publik untuk menghentikan program PetroCaribe tersebut memaksa pemerintah untuk mempertimbangkan ulang kebijakannya dan memberikan perhatian khusus (Elinda, 2017).

Meskipun mendapat berbagai tekanan yang datang dari berbagai pihak, nyatanya program PetroCaribe masih berjalan hingga saat ini. Walaupun sedang dalam masa krisis, pengiriman minyak tetap dilakukan ke negara-negara Karibia. Bahkan, pemerintah Venezuela yang saat ini dipimpin oleh Nicolas Maduro mendeklarasikan komitmennya dalam program PetroCaribe pada konferensi PetroCaribe tahun 2015 lalu sebagai upaya untuk meningkatkan solidaritas dengan negara-negara anggota. Hal yang menjadi perhatian penulis dalam tulisan ini adalah bagaimana PetroCaribe masih dipertahankan di tengah tekanan dari berbagai pihak, seperti masyarakat dan partai oposisi. Signifikansi PetroCaribe terletak pada argumen bahwa dengan tidak adanya PetroCaribe, situasi ini bahkan akan menjadi jauh lebih buruk.

Harga minyak naik dua kali lipat dalam dua tahun sebelum PetroCaribe, kemudian melonjak menjadi \$140 selama tiga tahun berikutnya. Kebijakan Venezuela terhadap PetroCaribe ini seakan semakin menguatkan strategi ekonomi yang digunakan terhadap negara-negara di Karibia di tengah krisis ekonomi yang melanda negara mereka. Perjanjian PetroCaribe memungkinkan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN milik Venezuela, perusahaan minyak *Petroleos de Venezuela* atau PDVSA, untuk menjual produk minyak mentah ke perusahaan-perusahaan dari negara-negara anggota PetroCaribe dengan persyaratan kredit preferensial. Kredit yang dimaksud adalah negara-negara penerima memiliki waktu hingga 25 tahun untuk membayar kembali biaya pembelian, dengan tingkat bunga 2 persen apabila harga minyak di bawah US \$40 dolar per barel dan 1 persen apabila harga lebih tinggi. Negara-negara anggota PetroCaribe juga menerima produk dengan pembiayaan 40

persen apabila harga berada di atas US \$50 dolar per barel, 50 persen jika sudah di atas \$80 per barel, dan 60 persen jika mencapai \$100 per barel atau lebih.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN LUAR NEGERI MADURO

1. Faktor Sosial

Terjadi keretakan sosial diantara masyarakat Venezuela karena masing-masing kelas sosial memiliki dukungan yang berbeda (Riggirozzi, 2016). Perbedaan dukungan menciptakan perselisihan di tengah masyarakat seiring dengan meningkatnya ketegangan antara pihak pemerintah Maduro dan pihak oposisi. Kekerasan dan kriminalitas pun meningkat akibat polarisasi dukungan di tengah masyarakat (Burton & Goertzel, 2016, p. 200). Setelah terjadi perpecahan masyarakat di negara ini, maka keadaan ini pun membuat pengungsi dari Venezuela melonjak secara tajam karena para pengungsi menganggap bahwa negara mereka sudah tidak aman dan lebih baik mengungsi ke negara lain, sementara yang sangat mendukung Maduro dan rela mati tetap ada di negara itu, namun dengan kondisi yang memprihatinkan. Orang-orang terus meninggalkan Venezuela untuk menghindari kekerasan, rasa tidak aman dan ancaman, serta kekurangan makanan, obat-obatan dan layanan kesehatan. Dengan lebih dari 4 juta penduduk Venezuela saat ini tinggal di luar negeri, mayoritasnya ada di negara-negara Amerika Latin dan Karibia, ini adalah eksodus terbesar dalam sejarah baru-baru ini di kawasan itu (United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), n.d.).

2. Faktor Psikologis

Maduro mempunyai pemikiran yang sangat keras, ia terlalu percaya kepada keyakinannya untuk bisa melawan Amerika Serikat, pada akhirnya keyakinannya ini tidak sesuai dengan harapan dan malah menimbulkan efek yang negatif. Oleh karena itu, jelaslah bahwa emosi memainkan peran penting dalam keputusan-keputusan politik yang penting. Pemimpin yang sebelumnya dikenal untuk mempengaruhi pemilihan umum, yang pada intinya dipengaruhi oleh peristiwa domestik dan internasional. Bangsa-bangsa sering membalas serangan dan provokasi terhadap warga dan wilayah mereka, tindakan yang membangkitkan emosi dan perasaan, seperti kebencian, ketakutan, kemarahan, keinginan untuk balas dendam, rasa tidak aman dan sebagainya.

Nicolas Maduro yang merupakan pengikut setia dari Hugo Chavez secara langsung berpengaruh kepada cara dia berpikir dalam mengambil keputusan dalam kebijakan luar negeri, yang secara keseluruhan menganut kebijakan yang sosialis, Maduro setuju untuk melanjutkan tongkat kepemimpinan Hugo Chavez yang otoriter dan susah untuk diberi masukan oleh rakyat, alhasil alih-alih mengambil jalan pintas malah berakibat adanya krisis yang berkepanjangan. Menurut peneliti, disini faktor psikologis Maduro mempunyai peran penting dalam kebijakan yang ia ambil karena kebijakannya terlihat sangat sosialis sekali dan hampir sama persis seperti kebijakan Hugo Chavez. Gaya kepemimpinannya pun serupa seperti Hugo Chavez.

3. Faktor Ekonomi

Secara garis besar negara Venezuela terus mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi hingga tahun 1970. Namun, semua itu berubah pada tahun setelahnya diakibatkan adanya gangguan pada perekonomian Venezuela. Elemen penting dalam pertumbuhan yang relatif rendah adalah proses nasionalisasi industri minyak. Periode antara 1978 dan 1989, negara tersebut memiliki pertumbuhan tahunan rata-rata negatif -2,6 persen, kemudian pada periode 1990-2016 pertumbuhan rata-rata tahunan adalah -0,2 persen dengan penurunan yang tajam pada tahun 2001 dan 2002, yakni 19 persen, sedangkan pada tahun 2013 hingga 2016 penurunan sebesar 30 persen. Perburukan perekonomian tidak hanya faktor penurunan harga minyak saja namun juga faktor politik dan ketidakstabilan variabel ekonomi lainnya. Ketidakstabilan perekonomian Venezuela juga diperburuk dengan pergolakan krisis politik di bawah kekuasaan otoriter Presiden Nicolas Maduro. Rezim Maduro dituduh telah melakukan berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang menyebabkan krisis kemanusiaan yang mendalam di Venezuela. Maduro juga memiliki berbagai kebijakan yang kontroversial, seperti penggunaan pengadilan dan pasukan keamanan untuk menindas dan menyingkirkan oposisi politik.

Keterpurukan ekonomi politik di Venezuela menandakan krisis di negara Venezuela yang ditandai dengan ketidakstabilan inflasi, kekurangan barang konsumsi, *sovereign debt* dan semakin buruknya kondisi kehidupan. Penetapan sistem ekonomi oleh pemerintah dengan harga terhadap bahan pokok makanan sangat murah sehingga mengakibatkan para produsen memilih untuk menjual barang mereka ke pasar gelap yang harganya jauh lebih mahal, yaitu mencapai lima belas kali lipat harga yang ditetapkan oleh pemerintah Venezuela sendiri. Hal tersebutlah kemudian yang dinilai menjadi sebab terjadinya kelangkaan bahan pangan di Venezuela yang menjadi cikal bakal krisis ekonomi di negara tersebut. Selama beberapa dekade Venezuela merupakan negara paling makmur di Amerika Selatan, tetapi sekarang Venezuela sekarang tertinggal di belakang diantara negara-negara di kawasan Amerika Selatan. *Shock* penurunan harga pada tahun 1980-an tidak menjadi pembelajaran bagi Presiden Hugo Chavez, akibatnya penurunan tajam harga minyak pada 2014 memiliki dampak yang cukup signifikan pada perekonomian Venezuela karena tidak adanya penahanan akan adanya *shock* harga minyak.

Kondisi ekonomi mengalami keterburukan dengan cepat dibawah Presiden Maduro, kondisi ini diperparah karena pada bulan November 2017 pemerintah mengumumkan akan adanya restrukturisasi utang pemerintah. Kondisi inflasi di Venezuela juga memprihatinkan yang mencapai rata-rata sekitar ratusan persen. Kondisi ini membuat inflasi Venezuela dikategorikan sebagai hiperinflasi. Istilah ini berarti kenaikan harga konsumen mencapai 50 persen dalam sebulan. *International Moneter Fund* (IMF) memproyeksi bahwa inflasi Venezuela mencapai 13.000 persen pada tahun 2018. Salah satu penyebab hiperinflasi ini adalah rendahnya harga minyak dunia, penurunan produksi minyak, serta kesalahan pengolahan ekonomi yang membebani pemerintah Venezuela. Selain itu, nilai tukar mata uang bolivar (mata uang

Venezuela) melemah terhadap dolar AS sejak awal 2016. Kebijakan penggantian uang kertas 100 bolivar dengan uang kertas lainnya. Hal ini belum cukup karena produksi barang telah anjlok dan biaya impor dalam mata uang lokal telah meroket, sehingga kombinasi ini yang membuat konsumen tidak bisa mengimbangi peningkatan harga.

4. Faktor Internasional

Kerjasama Venezuela dengan *International Monetary Fund* (IMF) sebagai titik awal reformasi ekonomi neoliberal mulai dijalankan. Semua sektor-sektor perekonomian yang tadinya dikendalikan oleh negara mulai diserahkan kepada swasta, kemudian peran dan kontrol pemerintah yang juga mulai perlahan hilang. Hal tersebut menjadikan perusahaan-perusahaan multinasional bisa melakukan penetrasi dengan leluasa dan hasilnya adalah harga-harga tidak bisa dikontrol oleh pemerintah serta pembagian pendapatan yang tidak berimbang dengan perusahaan-perusahaan tersebut, sebagian besar keuntungan mereka dibawa ke negara asalnya.

Kebijakan tersebut membuat terjadinya kemiskinan, keterbelakangan dan juga memperlebar jarak kesenjangan antara negara kaya dan miskin serta jeratan hutang yang sangat besar. Banyaknya perusahaan-perusahaan multinasional masuk ke Venezuela sebagai konsekuensi dari kesepakatan *Washington Consensus* yang salah satunya adalah liberalisasi pasar. Hal itulah yang menyebabkan banyaknya perusahaan-perusahaan multinasional (dalam konteks ini peneliti mengambil perusahaan Exxon Mobil dan Conoco Phillips), yang masuk dan mengambil alih perusahaan lokal. Sebuah permainan dari negara maju seperti Amerika Serikat untuk memanfaatkan dan menguasai sumber mineral (SDA) di Venezuela dengan regulasi dan syarat-syarat yang diberlakukan atau diterapkan oleh IMF seperti yang dijelaskan di atas untuk menghendaki perusahaan asing (MNC) mengakuisisi perusahaan lokal di sana.

Salah satu MNC yang mengakuisisi adalah Exxon Mobil dan Conoco Phillips perusahaan yang bergerak di bidang energi, setelah lama menguasai bidang energi di Venezuela lewat pengeboran minyak yang dilakukan kedua MNC tersebut, ternyata terlalu dominan dan kerap merugikan pemerintah Venezuela. Diantara permasalahan yang timbul adalah tingkat kesejahteraan di negara tersebut yang rendah, kesulitan dalam membangun perekonomian, serta pembagian hasil dari adanya MNC tersebut yang lebih dinikmati sebagian besar hasilnya dinikmati oleh perusahaan Amerika Serikat tersebut. Perusahaan-perusahaan multinasional menghasilkan kesenjangan antara negara kaya dan negara miskin, dalam hal ini adalah antara Amerika Serikat dan Venezuela.

IMF semakin memperjelas bahwa lembaga ini hanyalah cara negara-negara kaya, untuk menguasai ekonomi Venezuela khususnya di bidang minyak. Hal tersebut yang memunculkan protes ketidakpuasan dari Venezuela atas ketimpangan yang terjadi akibat dari sistem ekonomi kapitalis sehingga terjadilah kebijakan nasionalisasi Exxon Mobil dan Conoco Phillips sebagai bentuk kekecewaan pemerintah Venezuela pada Mei 2007. Kebijakan-kebijakan yang tidak memihak terhadap rakyat, yang dilakukan MNC membuat perlawanan dengan berbagai cara, salah satunya dengan menasionalisasi

perusahaan asing di negara tersebut khususnya yang bergerak di bidang energi atau minyak.

KESIMPULAN

Setelah peneliti menganalisis kebijakan ALBA & PetroCaribe, peneliti dapat menarik benang merahnya, yaitu 4 faktor ini berhasil mempengaruhi Maduro dalam mengambil kebijakan luar negeri tersebut, terlepas dari kebijakannya yang sosialis. Disini Maduro tidak mampu mengambil jalan alternatif lain, sehingga ia melanjutkan kebijakan sosialis Chavez dengan mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, politik serta pemikirannya yang anti terhadap Amerika Serikat. Dengan kebijakan ALBA & PetroCaribe tersebut yang akhirnya menjadi senjata Maduro untuk melawan neoliberalisme Amerika Serikat. Tujuannya adalah agar negara-negara di Amerika Latin dapat bersatu untuk menghadapi AS dengan sistem mempersatukan negara-negara di kawasan tersebut yang memang mempunyai sumber daya minyak yang melimpah. Namun diekspor ke negara lain, sehingga di negaranya sendiri harga minyak cenderung mahal dan tidak terjangkau untuk dibeli.

REFERENSI

- Azizah, S. (2014). Peran Common Market Amerika Latin/ Mercado Común del Sur (MERCOSUR) dalam Meningkatkan Perekonomian Brasil Melalui Kerjasama Ekonomi. *JOM FISIP*, 1(2), 1–15. Retrieved from <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/3340/3237>
- Burton, G., & Goertzel, T. (2016). *Presidential Leadership in the Americas since Independence*. USA: Lexington Books.
- Elinda, S. (2017). Alasan Tetap Dipertahankannya Program Petrocaribe Di Wilayah Karibia. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 6(2), 119–138. Retrieved from <http://journal.unair.ac.id/JAHI@alasan-tetap-dipertahankannya-program-petrocaribe-di-wilayah-karibia-article-11560-media-131-category-8.html>
- Ma'arif, S. (2012). Neososialisme Kebijakan Ekonomi Politik (Pengalaman Venezuela DiBawah Hugo Chavez). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 3(2), 1–14. Retrieved from <http://repository.lppm.unila.ac.id/13602/>
- Mintz, A., & DeRouen Jr., K. (2010). *Understanding Foreign Policy Decision Making*. United Kingdom: Cambridge University Press.
- Restuccia, D. (July, 2018). *The Monetary and Fiscal History of Venezuela 1960- 2016* (Working Paper No. 59). University of Chicago, Becker Friedman Institute for Economics. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3237748>
- Riggirozzi, P. (2016). Strong States, Strong Societies, Weak Democracies? Assessing State-Society Relationship in Latin America. In A. Saikal (Ed.), *Weak States, Strong Societies: Power and Authority in the New World Order*. New York: I.B. Tauris.
- United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). (n.d.). *Venezuela situation*. Retrieved from <https://www.unhcr.org/venezuela-emergency.html>